

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM UNTUK TAHUN 2006 – 2010

Oleh: Irsutami
Dosen Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam

Intisari

Kemandirian keuangan akan membantu dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun sumber daya alam menjadi factor percepatan suatu daerah untuk mandiri. Batam sebagai daerah yang berkembang memiliki potensi mencapai hal tersebut, dengan demikian diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Batam dengan periode analisis 2006 – 2010. Wawancara dan inspeksi sejumlah data sebagai metode pencarian data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam masih di bawah 25% untuk tahun 2006 – 2010 dengan derajat desentralisasi fiskal antara 10,1% - 20% yang berarti bahwa pendapatan asli daerah Batam masih kurang dapat diandalkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan belanja lainnya.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Pemerintah Kota Batam, Derajat Desentralisasi Fiskal

Abstraction

Financial autonomy will assist to implementation of regional autonomy, but the natural resources factor can acceleration it and Batam is potential reliaze that., thus research is needed to describe financial autonomy degree. The research was conducted in Government of Batam District with the period analisys is 2006 - 2010. Interviews and inspection several of data is done and using descriptive analysis method. The results of researceh showed that the level of financial autonomy Government of Batam District is still below 25% for the years 2006 to 2010 with the degree of fiscal decentralization between 10.1% - 20% which means that the Batam PAD are still less reliable for the operational governance and other expenditures.

Keywords: Financial Autonomy, the Government of Kota Batam, Degree of Fiscal Decentralization

PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatn Asli Daerah (PAD) yang diperolehnya dalam memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja modal, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat

kemandirian daerahnya, demikian juga sebaliknya semakin sedikit belanja yang dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah.

Sejatinya suatu daerah harus mampu membiayai seluruh keperluan daerahnya namun setiap daerah memiliki keterbatasan

sumberdaya. Adanya keterbatasan ini menyebabkan perbedaan kemakmuran antara tiap daerah, untuk itu, campur tangan pemerintah pusat dibutuhkan dalam bentuk kucuran dana perimbangan meskipun porsi masing-masing daerah berbeda-beda. Besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat tergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kebutuhan dan kapasitas daerah misalnya dana alokasi umum. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Batam sebagai daerah yang memiliki posisi yang strategis secara ekonomi seharusnya mampu mempercepat otonomi daerahnya karena selain letaknya yang strategis secara ekonomi dan politik, juga memiliki potensi laut/bahari yang bisa dimaksimalkan. Apakah dengan posisi yang menguntungkan tersebut, Batam bisa mencapai kemandirian secara finansial? Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini “bagaimana tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam untuk periode tahun 2006 – 2010.

KAJIAN TEORI

Otonomi Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat 5, dijelaskan bahwa pengertian dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Suparmoko (2002) mengatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemberian otonomi didasarkan pada desentralisasi dalam wujud ekonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Untuk daerah otonom, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat 6 menyebutkan bahwa daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah menurut smith, seperti yang dikutip dalam Halim (2004) dapat dibedakan dari dua kepentingan yakni kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk kepentingan pemerintah pusat, tujuan utamanya adalah politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi system pemerintahan daerah. Sedangkan kepentingan daerah bertujuan untuk; 1) Untuk mewujudkan *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di tingkat lokal. 2) Untuk mewujudkan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat, 3) Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudahantisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan social dan ekonomi daerah. **Pendapatan Asli Daerah.** Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim

(2004), pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, sedangkan Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku yang terdiri dari 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikelompokkan menjadi; 1) Pajak Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenias pajak daerah adalah a) pajak propinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. b) pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parker, 2)

Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat 2, Restribusi Daerah dibagi atas tiga golongan yaitu 1) retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha, dan 3) retribusi perizinan tertentu. 3) Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan diantaranya adalah bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi, pendapatan dari angsuran penjualan, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan penerimaan jasa giro. **Pendapatan Daerah.** Bantuan pemerintah pusat dan atau propinsi merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah selain PAD adalah sebagai berikut; 1) Dana Perimbangan. Menurut Bastian dan Soepriyanto (2002), dana perimbangan adalah semua pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan dari Propinsi.. Sebagai negara kepulauan maka sudah

seharusnya Indonesia mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di bawah slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membagi pendapatan nasional secara berimbang ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara agregat sesuai dengan undang-undang yang telah diamanatkan. Wujud dari upaya tersebut telah dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005. Di dalam Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Prinsip kebijakan perimbangan keuangan telah dijelaskan dalam pasal 2 yakni a) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, b) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal, dan c) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 2) Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan ini adalah pendapatan yang

bukan berasal dari PAD maupun Dana Perimbangan. **Kemampuan Keuangan Daerah.** Dalam peraturan pemerintah nomor 105 Tahun 2000 menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konsekwensinya akan menimbulkan perbedaan antar daerah satu dengan yang lainnya. Menurut Nataluddin (2001), ada 4 (empat) kategori kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi yakni; 1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah, 2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, 3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah, 4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Adapun ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah seperti yang disebutkan oleh Nataluddin (2001) sebagai berikut; 1) Kemampuan keuangan daerah yaitu daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan

daerah sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar. Semakin tinggi rasion kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuabn oihak eksternal semakin rendah dan demikian sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang meruipakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

METODOLOGI

Jenis Penelitian, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana peneliti akan menggambarkan secara faktual tentang tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam. **Objek Penelitian,** Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Batam dengan fokus pada kemandirian keuangan Kota Batam. **Data dan Sumber Data,** Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Metode Pengumpulan Data, adapun metode pengumpulan data yang dipilih adalah 1) Dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan beberapa bukti tertulis dalam bentuk laporan terkait dengan pendapatan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam dan 2) Wawancara. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang perkembangan pendapatan daerah Kota Batam, rencana dan realisasi program kerja, upaya-upaya yang

dilakukan Pemerintah Daerah Kota Batam, dan kendala-kendala yang dihadapi. **Metode Analisis Data,** metode analisis data yang dilakukan adalah metode kuantitatif berupa analisis rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam untuk tahun 2006 – 2010. Adapun tahap-tahap analisis yang dilakukan adalah; 1) Menghitung rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam untuk tahun 2006 – 2010 sekaligus menentukan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah Kota Batam yang didasarkan pada hasil perhitungan rasio/tingkat kemandirian keuangan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio/tingkat kemandirian keuangan suatu daerah adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Eksternal}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2002)

1. Menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal untuk melihat kemampuan daerah Kota Batam dalam meningkatkan pendapatn asli daerah sekaligus menentukan kemampuan keuangannya berdasarkan hasil perhitungan rasio. Untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DDF} = \frac{\text{PAD } t}{\text{TPD } t} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD t = Total Pendapatan Daerah tahun t

Untuk skala intervalnya. Disajikan pada Tabel 3.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00.00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Cukup
30.01 - 40.00	Sedang
40.01 - 50.00	Baik
> 50.00	Sangat Baik

Sumber: Abdul Halim (2002)

2. Melakukan analisis secara umum mengenai hasil perhitungan kedua rasio tersebut di atas. Analisa ini dilakukan bersamaan dengan penyajian perhitungan kedua rasio di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Kota Batam

Untuk melihat potensi ekonomi Kota Batam, maka akan diuraikan kondisi umum Kota Batam yang terdiri dari aspek luas wilayah, letak geografis, kondisi iklim dan curah hujan, kondisi topografi, jumlah penduduk,

tenaga kerja, dan tingkat pendidikan penduduk Kota Batam.

Pemerintah Kota Batam merupakan Pemerintah Kotamadya Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 yang diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983. Keberadaan Pemerintah Kotamadya Batam adalah merupakan implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Akibat pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Daerah Kota Batam, maka saat ini Kota Batam memiliki 12 (dua belas) kecamatan dan 64 (enam puluh empat) kelurahan. Secara geografis, Kota Batam memiliki posisi yang strategis yakni terletak di jalur pelayaran internasional karena di sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Lingga, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Karimun dan laut internasional, dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Secara makro, keberadaan negara tetangga Singapura dan Malaysia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian Kota Batam. Dalam hal investasi, Batam menjadi lokasi yang paling menguntungkan kedua negara tersebut untuk melakukan aktivitas industrinya, selain karena keberadaan lahan yang masih luas, juga kemudahan dalam berinvestasi yang diberikan. Dengan melakukan realokasi industrinya ke Batam, maka hal ini memberikan keuntungan yang positif baik dari aspek perekonomian, aspek peluang dan penyerapan tenaga kerja, maupun dari aspek pariwisata Batam. Topografi wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-

bukit di tengah pulau dengan ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru. Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0 – 3% tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3 – 10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur, dari Teluk Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi perkotaan. Kelerengan antara 10 – 20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah tersebar dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20 – 40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang Bukit Dangas Pancur dan Bukit Senyum. Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169 m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m. Dari kondisi iklim dan curah hujan, Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum antara 21,2 - 23,5 °C dan maksimum antara 31,6 - 34,2°C. Adapun suhu rata-rata sepanjang tahun 2009 adalah 26,6 hingga 28,2°C dengan tekanan udara

rata-rata minimum 1005,1 mbs dan maksimum 2005,8 mbs. Kelembaban udara minimum berkisar 44% – 58% dan maksimum 98% - 100% dengan rata-rata kelembaban berkisar 79% – 86%. Kecepatan angin maksimum 16 knot hingga 28 knot dengan arah dan kecepatan rata-rata berkisar antara 3 – 9 knot. Pada tahun 2009, banyaknya curah hujan selama setahun adalah 184 hari dengan curah hujan 1.976,5 mm. Kota Batam merupakan salah satu miniatur Indonesia karena penduduknya terdiri dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Setiap tahun penduduk Kota Batam mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2006 berjumlah 713.960 jiwa dan meningkat menjadi 1.046.188 jiwa tahun 2010, jandi meningkat sekitar 46,53% disbanding dengan tahun 2006. Pada aspek tenaga kerja, pada bulan Agustus 2010, tenaga kerja Kota Batam yang terdaftar berjumlah 279.668 orang atau 58,60% yang bekerja pada sector industry, di sector jasa 12,92%, sector bangunan 10,49%, sector perdagangan dan hotel 8,96%, sector keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 6,94%, sedangkan sector pengangkutan dan komunikasi hanya sebesar 1,11%, sector pertanian 0,57%, sector listrik gas dan air bersih 0,24% serta sector pertambangan dan penggalian sebesar 0,12%.

Untuk tingkat pendidikan penduduk Kota Batam berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada posisi September 2010, komposisi tingkat pendidikan penduduk Kota Batam adalah 7,65% tamat SD, 8,83% tamat SLTP, 44,06% tamat SLTA, Diploma I/II sebesar 0,59%, Diploma III/Sarjana Muda sebesar 1,93%, Diploma IV/Strata I/II/III masing-masing 3,22% Diploma IV/Strata I, 0,13% Strata II, dan sebesar 0,02% Strata III. Dari jumlah tersebut, 10,83 yang belum tamat SD sedangkan yang tidak/belum sekolah sebesar 22,66%.

Kondisi Ekonomi Kota Batam.

Perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, hal ini dapat tercermin dari pertumbuhan angka PDRB.

Potensi Unggulan. Potensi unggulan daerah Kota Batam pada dasarnya dapat dilihat dari Komposisi sektor ekonomi yang merupakan bagian nilai yang disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB, yaitu nilai suatu sektor (PDRB suatu sektor) dibandingkan dengan nilai keseluruhan sektor (total PDRB). Komposisi sektor merupakan gambaran awal untuk memahami sektor-sektor manakah yang berpotensi menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB suatu daerah. Adapun sector unggulan Kota Batam yang paling banyak memberikan kontribusi ke dalam PDRB adalah sector industry pengolahan, sector perdagangan hotel dan restoran, sector keuangan persewaan dan jasaperusahaan, dan sector bangunan. Untuk lebih jelasnya, berikut rincian potensi unggulan daerah Kota Batam menurut berdasarkan lapangan usaha sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Distribusi Potensi Unggulan Pada PDRB Kota Batam
Tahun 2006 – 2009 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)

No.	Lapangan Usaha	2006	2007	2008)*	2009)**
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1,38	1,31	1,26	1,23
2	Pertambangan dan penggalian	0,17	0,16	0,15	0,15
3	Industri pengolahan	63,31	63,41	62,96	61,97
4	Listrik, gas dan air bersih	0,26	0,25	0,25	0,67
5	Bangunan	2,16	2,21	2,24	2,44
6	Perdagangan, hotel dan restoran	23,41	23,71	24,02	24,57
7	Pengangkutan dan komunikasi	2,83	2,76	3,17	3,09
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	5,18	4,91	4,68	4,60
9	Jasa-jasa	1,30	1,28	1,28	1,29

Sumber : BPS Kota Batam : *) Angka perbaikan **) Angka sementara

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kota Batam cukup mengalami pertumbuhan dari tahun 2006 ke 2008 terutama untuk sektor angkutan yang pertumbuhannya signifikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Batam. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2006-2009 (berdasarkan tahun dasar 2000)

Sektor	2006	2007	2008)*	2009)**
1. Pertanian	0,70	1,45	3,28	2,66
2. Pertambangan	2,17	2,04	2,25	1,21
3. Industri	7,67	7,68	6,42	3,73
4. Listrik, Gas, Air	5,48	5,57	5,91	1,65
5. Bangunan	9,76	9,78	8,80	13,85
6. Perdagangan	9,34	8,89	8,58	7,05
7. Angkutan	3,38	4,99	22,74	2,19
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,80	1,97	2,04	2,85
9. Jasa-jasa	4,17	6,03	6,75	5,63
Batam	7,48	7,52	7,18	4,65

Sumber : BPS Kota Batam *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam untuk periode tahun 2006 – 2010 menunjukkan perkembangan yang sangat baik meskipun sedikit mengalami penurunan di tahun 2010. Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan perkembangan PAD Kota Batam periode 2006 – 2010 sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
Periode Tahun 2006 – 2010

No.	Tahun	Jenis Penerimaan	Anggaran	Realisasi	%
1	2006	1 Pajak Daerah	54.100.000.000.00	58.607.109.519.13	108.33
		2 Retribusi Daerah	18.969.720.000.00	20.472.338.610.00	107.92
		3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	800.000.000.00	895.926.836.00	111.99
		4 Lain-Lain PAD Yang Sah	8.268.066.480.00	15.271.822.212.59	184.71
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			82.137.786.480.00	95.247.197.177.72	115.96
2	2007	1 Pajak Daerah	70.800.000.000.00	72.087.964.127.70	101.82
		2 Retribusi Daerah	21.625.000.000.00	19.751.276.414.00	91.34
		3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.219.472.019.00	2.267.703.066.00	102.17
		4 Lain-Lain PAD Yang Sah	16.435.797.370.00	13.452.112.441.25	81.85
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			111.080.269.589.00	107.559.056.048.95	96.83
3	2008	1 Pajak Daerah	102.841.860.000.00	106.760.399.041.40	103.81
		2 Retribusi Daerah	23.813.500.000.00	24.201.649.140.00	101.63
		3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.354.926.397.00	1.354.926.397.00	100.00
		4 Lain-Lain PAD Yang Sah	6.603.000.000.00	10.077.651.498.86	152.62
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			134.613.286.397.00	142.394.626.077.26	105.78
4	2009	1 Pajak Daerah	116.094.268.500.00	114.716.025.778.79	98.81
		2 Retribusi Daerah	18.904.245.500.00	20.013.074.558.00	105.87
		3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.034.085.159.00	2.034.085.159.00	100.00
		4 Lain-Lain PAD Yang Sah	14.087.590.656.30	17.612.666.458.02	125.02
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			151.120.189.815.30	154.375.851.953.81	102.15
5	2010)*	1 Pajak Daerah	128.219.929.638.00	95.420.780.373.42	74.42
		2 Retribusi Daerah	18.368.611.375.00	13.756.134.978.00	74.89
		3 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.693.254.828.00	1.693.254.828.00	100.00
		4 Lain-Lain PAD Yang Sah	26.762.697.361.00	10.086.717.175.44	37.69
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			175.044.493.202.00	120.956.887.354.86	69.10

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam *) Data realisasi pendapatan sampai September 2010

Dari Tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa PAD Kota Batam cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2006 – 2009 dan relatif melampaui target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2010 yang datanya hanya penulis dapatkan sampai September 2010 mengalami penurunan. Sepanjang periode tahun 2006 – 2010, Pajak Daerah memberikan kontribusi yang tinggi di banding sumber pendapatan lainnya. Untuk tahun 2006, kontribusi Pajak Daerah sebesar 0,615%, mengalami kenaikan di tahun 2007 menjadi 0,670%, begitu pun tahun 2008, Pendapatan Daerah Kota Batam cukup menggembirakan dari tahun 2007 yakni menjadi 0,7450%, relatif stabil di tahun 2009 dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,743%, dan tahun 2010 cukup menggembirakan yakni sebesar 0,789%. Sedangkan sumber PAD Kota Batam lainnya, perolehannya masih dijauh dari Pajak Daerah yakni rata-rata di bawah 0,287%. Untuk pencapaian target yang telah

direncanakan, menunjukkan angka yang relatif terpenuhi yakni tahun 2006 sebesar 115,96% melebihi 15,96% dari target yang direncanakan, tahun 2007 sebesar 96,83% kurang 3,12%, tahun 2008 sebesar 105,78% melebihi 5,78% dari target, tahun 2009 sebesar 102,15% melebihi 2,15% dari target, dan tahun 2010 sebesar 69,10% kurang 30,90% dari target yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan Tabel 4.4 Kenaikan dan Penurunan PAD Kota Batam Berdasarkan Sumbernya Untuk Periode tahun 2006 – 2010 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kenaikan dan Penurunan PAD Kota Batam Berdasarkan Sumbernya
Periode Tahun 2006 – 2010 (dalam %)

Sumber PAD	2006	2007	2008	2009	2010*)
Pajak Daerah	0.615	0.67	0.750	0.743	0.789
Retribusi Daerah	0.215	0.184	0.170	0.130	0.114
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.009	0.021	0.010	0.013	0.014
Lain-Lain PAD Yang Sah	0.16	0.125	0.071	0.114	0.083

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam *) Data realisasi pendapatan sampai September 2010

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa Kota Batam, PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah terus mengalami penurunan hingga tahun 2010, begitu pun terhadap PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah yang cenderung mengalami penurunan. Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, menunjukkan persentasi yang cukup stabil meskipun masih kecil pertumbuhannya.

Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan yang dibukukan oleh suatu daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lian-lain Pendapatan Yang Sah. Untuk periode tahun 2006 – 2010, pendapatan daerah Kota Batam cukup mengalami pertumbuhan yang baik seiring dengan penambahan jumlah penduduk Batam. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan Tabel 4.5 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota

Batam Untuk Periode 2006 – 2010 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perkembangan Pendapatan Daerah Periode 2006-2010

No.	Tahun	Jenis Penerimaan	Anggaran	Realisasi	%
1	2006	1 Pendapatan Asli Daerah	82,137,786,480.00	95,247,197,177.72	115.96
		2 Dana Perimbangan	447,428,297,710.05	564,622,341,187.56	126.19
		3 Lain-lain Pendpt. Yg. Sah	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan Daerah			529,566,084,190.05	659,869,538,365.28	124.61
2	2007	1 Pendapatan Asli Daerah	111,080,269,589.00	107,559,056,048.95	96.83
		2 Dana Perimbangan	509,539,207,635.00	515,010,773,951.50	101.07
		3 Lain-lain Pendpt. Yg. Sah	60,500,000,000.00	61,754,143,490.10	102.07
Jumlah Pendapatan Daerah			681,119,477,224.00	684,323,973,490.55	100.47
3	2008	1 Pendapatan Asli Daerah	134,613,286,397.00	142,394,626,077.26	105.78
		2 Dana Perimbangan	553,174,348,711.86	677,336,174,435.31	122.45
		3 Lain-lain Pendpt. Yg. Sah	76,454,075,787.00	62,469,118,868.40	81.71
Jumlah Pendapatan Daerah			764,241,710,895.86	882,199,919,380.97	115.43
4	2009	1 Pendapatan Asli Daerah	151,120,189,815.30	154,375,851,953.81	102.15
		2 Dana Perimbangan	728,329,440,247.43	748,124,997,010.00	102.72
		3 Lain-lain Pendpt. Yg. Sah	3,294,611,017.00	8,617,436,419.50	261.56
Jumlah Pendapatan Daerah			882,744,241,079.73	911,118,285,383.31	103.21
5	2010)*	1 Pendapatan Asli Daerah	175,044,493,202.00	120,956,887,354.86	69.10
		2 Dana Perimbangan	847,689,589,116.00	549,744,296,363.00	64.85
		3 Lain-lain Pendpt. Yg. Sah	65,547,638,575.00	32,940,449,889.00	50.25
Jumlah Pendapatan Daerah			1,088,281,720,893.00	703,641,633,606.86	64.66

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam *) Data realisasi pendapatan sampai September 2010

Dari Tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa total pendapatan daerah Kota Batam setiap tahunnya mengalami peningkatan. penerimaan terbesar masih didominasi oleh dana perimbangan, disusul PAD Kota Batam dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Meningkatnya dana perimbangan setiap tahunnya karena Kota Batam adalah termasuk daerah yang masih dalam tahap daerah berkembang yang masih memerlukan dana untuk membangun berbagai infrastruktur Kota Batam. Dari data Tabel 4.5 juga dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Batam mampu menyusun anggaran pendapatan daerah yang akurat, hal ini dapat dilihat dari total realisasi penerimaan yang setiap tahunnya menunjukkan angka di atas 100%. Untuk tahun 2006, total realisasi pendapatan daerah 24,61% di atas dari target yang direncanakan, tahun 2007

menunjukkan angka 0,47% di atas target, tahun 2008 sebesar 15,43% di atas target, tahun 2009 sebesar 3,21% di atas target, dan tahun 2010 sebesar 35,34 % di bawah target. Khusus tahun 2010, total penerimaan yang dibukukan hanya sampai September sehingga terjadi penurunan.

Untuk perkembangan total penerimaan setiap tahunnya untuk masing-masing jenis penerimaan periode 2006 -2010 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Perkembangan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Batam
Per Jenis Penerimaan Periode 2006 – 2010

Jenis Penerimaan	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Asli Daerah	0.144	0.157	2.279	0.169	0.172
Dana Perimbangan	0.856	0.753	0.768	0.821	0.781
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0.000	0.090	0.071	0.009	0.047

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam *) Data realisasi pendapatan sampai September 2010

Dari tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa jenis penerimaan dari Dana Perimbangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan jenis penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sampai tahun 2008. Untuk jenis penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah masih berfluktuasi sampai tahun 2010.

Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Batam

Perhitungan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berguna untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakatnya. Hal ini sangat penting untuk diketahui mengingat seluruh dana yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang sudah diatur dalam peraturan daerah. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, maka dapat menunjukkan apakah suatu daerah memiliki ketergantungan yang besar

terhadap pihak eksternal, ini bisa ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan suatu daerah, ini menunjukkan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap dana yang berasal dari luar daerah tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Batam untuk tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.7 Perhitungan Tingkat kemandirian keuangan Kota Batam Untuk Tahun 2006 – 2010 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Batam Tahun 2006 -2010

Tahun	PAD (1)	Dana Eksternal (2)	Kemandirian (1) : (2)	Pola Hubungan
2006	95.247.197.177.72	564.622.341.187.56	16,87%	Instruktif
2007	107.559.056.048.95	576.764.917.441.60	18,65%	Instruktif
2008	142.394.626.077.26	739.805.293.303.71	19,25%	Instruktif
2009	154.375.851.953.81	756.742.433.429.50	20,40%	Instruktif
2010	120.956.887.354.86	582.684.746.252.00	20,76%	Instruktif

Sumber: Diolah Sendiri

Dari Tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kota Batam selama 2006 – 2010 memiliki rata-rata tingkat kemandirian yang masih sangat rendah, hal ini berarti bahwa ketergantungan pada pihak pusat masih sangat tinggi, namun dalam kurun waktu tersebut, tingkat kemandirian keuangan setiap tahun mengalami peningkatan namun pola hubungannya masih bersifat instruktif yakni antara 0% - 25%. Kenaikan rasio kemandirian dari tahun 2006 sebesar 16,87% menjadi 18,65% di tahun 2007 disebabkan oleh meningkatnya pendapat pada sector pertanian, listrik, gas, dan air, angkutan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sector jasa-jasa lainnya. Tahun 2008, tingkat kemandirian keuangan Kota Batam naik menjadi 19,25%, ini disebabkan oleh sector pertanian yang semakin membaik, sector pertambangan, listrik, gas, air, bangunan, sector keuangan, persewaan & jasa perusahaan, sector jasa-

jasa serta adanya perbaikan di sector angkutan yang mampu memberikan kontribusi paling tinggi di tahun 2008 yakni dari 4,99% di tahun 2007 menjadi 22,74 di tahun 2008. Untuk tahun 2009, tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kota Batam, mengalami penurunan yang cukup besar, hal ini disebabkan oleh adanya krisis global yang mempengaruhi ekonomi negara di seluruh dunia yang secara tidak langsung mempengaruhi beberapa perusahaan yang akan dan sedang melakukan investasi di Batam. Rasio kemandirian keuangan yang masih sangat rendah ini menandakan bahwa Kota Batam belum memiliki kemampuan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya atau masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Dari aspek penerimaan PAD, Pemerintah Kota Batam sudah berupaya untuk meningkatkan PADnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6 dimana dari tahun 2006 – 2008, kenaikan PAD Kota Batam masih menunjukkan trend positif, meskipun di tahun 2009 mengalami penurunan, namun pada tahun 2010 mengalami kenaikan meskipun masih sangat kecil. Sebagai daerah yang masih dalam tahap pengembangan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka PAD Kota Batam masih belum mampu membiayai sepenuhnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya sehingga perlu bantuan dari Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Daerah Kota Batam harus mampu lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber pendapatn alternative mengingat Batam masih memiliki potensi-potensi sumber daya yang masih belum dikelola dengan maksimal seperti potensi kekayaan laut, potensi wisata bahari, jasa bongkar muat, angkutan, pertanian, dan usaha-usaha jasa lainnya. Untuk itu, diperlukan perbaikan dari berbagai aspek seperti peraturan daerah, pelayanan ke masyarakat,

dan tata kelola organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Batam. Untuk melihat kemampuan pemerintah Kota Batam dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunannya, maka perlu dihitung derajat desentralisasi fiskalnya. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.8 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berikut ini:

Tabel 4.8
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2006 – 2010

Tahun	PAD	TPD	DKK	KKD
2006	95.247.197.177.72	529.566.084.190.05	17.99%	Kurang
2007	107.559.056.048.95	681.119.477.224.00	15.79%	Kurang
2008	142.394.626.077.26	764.241.710.895.86	18.63%	Kurang
2009	154.375.851.953.81	882.744.241.079.73	17.49%	Kurang
2010	120.956.887.354.86	1.088.281.720.893.00	11.11%	Kurang

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Batam selama lima tahun yakni dari 2006 - 2010 cenderung mengalami penurunan dan relatif kecil. Pada tahun 2006 rasio derajat desentralisasi fiskal adalah 17,99%, kemudian turun menjadi 15,79% di tahun 2007, tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 18,63%, kemudian turun di tahun 2009 menjadi 17,49% dan terus turun menjadi 11,11% di tahun 2010. Jadi rata-rata derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Batam adalah 16,20% dan berada dalam skal interval antara 10,01 – 20,00. Ini menunjukkan bahwa PAD Kota Batam mempunyai kemampuan yang “kurang” dalam membiayai pembangunan daerahnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan. 1) Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam untuk periode tahun 2006 – 2010 menunjukkan bahwa Kota Batam masih memiliki

ketergantungan keuangan pada Pemerintah Pusat dengan pola hubungan Instrukturif dimana berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan yang diperoleh untuk tahun 2006 – 2010 masih di bawah 25%. 2) Derajat desentralisasi fiskal Kota Batam menurut hasil perhitungan masih di bawah 20% atau antara 10,01% - 20% dengan kategori “kurang”. Ini berarti bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh untuk tahun 2006 – 2010 masih kurang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan belanja lainnya.

Saran-saran. 1) Pemerintah Daerah Kota Batam harus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan pelayanan dan peningkatan kerjasama dengan semua pihak, 2) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab, 3) Peningkatan kinerja baik terhadap pegawai maupun terhadap SKPD terkait pengelolaan pendapatan daerah bidang penagihan, pendapatan dan penetapan, 4) Pengkajian kembali peraturan daerah sebagai dasar pungutan berupa peraturan sanksi-sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar peraturan daerah, dan 5) Melakukan upaya untuk mencari sumber-sumber alternatif perolehan pendapatan asli daerah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam pengkajian area-area yang memiliki potensi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra, 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Bastian Indra, Supriyanto, Sistem akuntansi Sektor Publik, Buku 1 & 2, Salemba Empat, Jakarta, _____2002.

Halim Abdul, Manajemen Keuangan Daerah, UPP YKPN, Yogyakarta, Tahun 2001

_____, 2002, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi I, Salemba Empat, Jakarta.

_____, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta.

Nataluddin. Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan Di Daerah Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Nazir Mohammad, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 2003

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Batam, Kepulauan Riau, 2012, http://batamkota.go.id/pemerintahan_baru.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Putri Sari Dewi, dalam penelitian yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah

kabupaten Pasuruan Pada untuk periode 2001 – 2008, Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Tingkat I Riau.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Daerah Kota Batam.

Suparmoko, Ekonomi Publik, Andi, Yogyakarta, Tahun 2002.

Tripatria Gema Aries, Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, _____2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah.